

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT KEMISKINANDI KOTA MANADO

Konny Joula Ellen Rasu¹, Anderson G. Kumenaung², Rosalina A.M. Koleangan³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan artinya jika pendapatan asli daerah meningkat, tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana lokasi umum meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana lokasi khusus meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana bagi hasil meningkat akan menurun angka kemiskinan.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, DBH dan Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is a condition of one's inability to fulfill basic needs such as food, clothing, shelter, and health. This condition of incompetence is characterized by the low ability of income to fulfill basic needs in the form of food, clothing and shelter. This low income capability will also reduce the ability to meet average living standards such as public health standards and education standards. The purpose of this study is to analyze how the influence of PAD, DAU, DAK and DBH on the City Poverty Rate Manado. The analysis technique used is multiple regression analysis. The results of the study show that the Local Original Income has a negative and significant effect on the poverty level, which means that if the regional income increases, the poverty rate will decrease. The General Allocation Fund has a positive and not significant effect on poverty, meaning that if the general location funds increase, the poverty rate will increase but not significantly. The Special Allocation Fund has a positive and insignificant effect on poverty, meaning that if special location funds increase, the poverty rate will increase but not significantly. Profit Sharing funds have a negative and not significant effect on poverty, meaning that if the profit sharing funds increase, poverty will decrease.

Keywords: PAD, DAU, DAK DBH and Poverty

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Menurut Kunarjo dalam Badrul Munir (2002:10), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan.

Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Persoalan kemiskinan menjadi salah satu kebijakan pembangunan di setiap negara. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan berbagai upaya pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut (Denni Sulistio Mirza, 2012). Dalam mengatasi kemiskinan dibutuhkan program-program dan kebijakan yang tepat dari pemerintah, karena semakin tinggi jumlah dan presentase penduduk miskin disuatu daerah tentunya akan menjadi beban dalam pembangunan daerah tersebut. Sehingga dibutuhkan peran yang besar dari pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan otonomi daerah dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Aspek desentralisasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah pasal 279 ayat 1 yang berbunyi "Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.

Pemerintah daerah harus berupaya dalam memberantas kemiskinan dengan berbagai program dan kebijakan yang dibuat dengan pembiayaan-pembiayaan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pembiayaannya ialah melalui pendapatan asli daerah yang didapatkan dari pos-pos potensi yang dikembangkan oleh daerah itu, juga dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana APBN/APBD yang dikeluarkan pemerintah baik daerah maupun pusat untuk program-program pengentasan kemiskinan dapat dikatakan berhasil bila jumlah dan presentase penduduk miskin berkurang bahkan tidak ada.

Berikut perkembangan angka kemiskinan, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, alokasi khusus dan dana bagi hasil Kota Manado Tahun 2007-2017 disajikan dalam bentuk tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan PAD, DAU, DAK, DBH dan Tingkat Kemiskinan
Kota Manado Tahun 2007-2017

Tahun	Kemiskinan	PAD	DAU	DAK	DBH
2007	5.43	54.715.561	374.754.000	35.379.000	37.397.000
2008	6.59	73.898.733	430.073.269	42.741.000	41.506.863
2009	6.32	72.404.996	420.752.563	43.750.000	44.264.400
2010	6.15	72.404.996	420.481.311	28.014.400	60.747.411
2011	5.40	134.721.720	482.198.138	41.300.000	49.347.807
2012	4.91	178.307.223	576.989.312	44.229.500	66.138.557
2013	4.88	215.871.042	647.565.931	51.989.870	57.487.390
2014	4.81	263.392.316	729.213.779	49.614.960	34.184.855
2015	5.63	282.525.557	750.810.852	147.113.780	29.042.967
2016	5.24	344.955.423	1.950.731.371	237.093.306	51.092.256
2017	5.46	306.767.257	-	242.835.000	52.318.408

Sumber : Kota Manado Dalam Angka

Kota Manado merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelolah setiap potensi dan sumber daya yang ada. Dilihat dari tabel diatas untuk angka kemiskinan di Kota Manado dalam kurun waktu 2007 sampai 2017 dilihat dari trendnya cenderung fluktuatif. Tahun 2007 kemiskinan diangka 5.43 persen mengalami kenaikan pada tahun 2008 diangka 6.59 persen tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 5.40 persen dan turun diangka 4.91 persen di tahun 2012. Pada tahun 2015 meningkat diangka 5.63 persen sampai tahun 2017 kemiskinan mencapai angka 5.46 persen.

Pendapatan daerah yang didapat dari potensi-potensi yang ada didaerah perupah pendapatan asli daerah di Kota Manado dapat dilihat pada tabel diatas perkembangannya dalam kurun waktu 2007 sampai 2017 memiliki trend meningkat setiap tahunnya. Tahun 2007 pendapatan asli daerah Kota Manado berjumlah Rp 54.715.561 juta mengalami peningkatan pada tahun berikutnya tahun 2008 menjadi Rp 73.898.733 juta. Pada dua berturut-turut tahun 2009 sampai 2010 pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp 72.404.996 juta, mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi Rp 134.721.720 juta terus meningkat tahun 2012 menjadi Rp 178.307.223 juta meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp 215.871.042 juta, tahun 2014 meningkat menjadi Rp 263.392.316 juta terus meningkat sampai tahun 2016 menjadi Rp 344.955.423 juta akan tetapi tahun 2017 penerimaan pendapatan asli daerah terjadi penurunan menjadi Rp 306.767.257 juta.

Selain pendapatan asli daerah penerimaan daerah juga bersumber dari dana perimbangan yang dalam penelitian ini diambil dana bagi hasil baik itu pajak maupun bukan pajak. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk pemerataan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*). Sejak desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tahun 2001, dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Tahun 2007 penerimaan daerah dari dana bagi hasil di Kota Manado sebesar Rp 37.397.000 juta meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp 41.506.863 juta meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp 44.264.400 juta. Tahun 2010 terus meningkat menjadi Rp 60.747.411 juta akan tetapi pada tahun 2011 Rp 49.347.807 juta dan pada tahun berikutnya dana bagi hasil kembali meningkat tahun 2012 Rp 66.138.557 juta, kembali mengalami penurunan dana bagi hasil di tahun 2013 menjadi Rp 57.487.390

juta terus mengalami penurunan dana bagi hasil pada tahun 2014 menjadi Rp 34.184.855 juta dan tahun 2015 turun menjadi Rp 29.042.967 juta. Tahun 2016 dana bagi hasil Kota Manado kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 51.092.256 juta sampai tahun 2017 meningkat menjadi Rp 52.318.408 juta.

Dengan terbitnya Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi Dana Alokasi Umum ini bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan dana antara pusat dan daerah besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ini sekurang-kurangnya 26 % dari pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Sedangkan proporsi DAU untuk daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan antara propinsi dan Kabupaten/kota formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiskal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan. Penyaluran DAU, DAK dan DBH disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah. Hal ini berkaitan dengan perimbangan antara pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan antara pusat dan daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007) lebih lanjut menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) hal tersebut menunjukkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana dana tersebut secara leluasa dapat dipergunakan untuk pelaksanaan desentralisasi

Tinjauan Pustaka Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan transfer yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari transfer pemerintah atasan yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan ini meliputi : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dengan terbitnya Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi Dana Alokasi Umum ini bersifat Block Grant yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2003 tentang perimbangan dana antara pusat dan daerah besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ini sekurang-kurangnya 26 % dari pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Sedangkan proporsi DAU untuk daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan antara propinsi dan Kabupaten/kota formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (fiskal gap) yaitu selisih antara kebutuhan. Penyaluran DAU, DAK dan DBH disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah. Hal ini berkaitan dengan perimbangan antara pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan antara pusat dan daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007) lebih lanjut menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) hal tersebut menunjukkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana dana tersebut secara leluasa dapat dipergunakan untuk pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. Kegiatan khusus ini sulit untuk diperkirakan dengan rumus alokasi khusus. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat untuk tujuan nasional. Kebutuhan khusus alokasi DAK meliputi :

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
5. Pembangunan Jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih

DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah, oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008).

Menurut Abdullah dan Halim (2006) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintahan daerah. Menurut Abimayu (2005) yang dikutip oleh Arianto dan Adi (2007) infrastruktur dan sarana prasana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jika sarana prasana yang memadai di daerah itu maka masyarakat akan dapat melaksanakan aktifitas pekerjaan sehingga akan berdampak positif terhadap roda perekonomian sehingga akan berpengaruh pada produktifitas yang semakin meningkat.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (1), DBH terdiri atas Pajak dan Sumber Daya Alam: Sumber-sumber penerimaan DBH adalah Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH yang bersumber dari pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 25/29 dan 21. Sementara DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (2), besaran dana bagi hasil adalah sebagai berikut: Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari PBB dengan imbalan 10% untuk daerah. Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari BPHTB dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi Hasil pajak penghasilan pasal 25/29 dan 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Sementara itu, dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Manado dan jenis data yang digunakan adalah *Time series*. Data *Time Series* dari tahun 2007 sampai tahun 2017.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Kota Manado Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan periode waktu penelitian Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari data kuantitatif dengan metode sumber data sebagai berikut :

1. Data sekunder :Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado dan publikasi yang menyangkut penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis table dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 0.8*.

Analisis Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variable tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variable tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variable bebas (*independent variable*). Model analisis regresi berganda sebagai berikut

$$Y = f(X_1, X_2)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

- Y = Kemiskinan
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Alokasi Umum
- X₃ = Dana Alokasi Khusus
- X₄ = Dana Bagi Hasil
- α = Konstanta/ Intercept
- β = Koefisien Regresi
- e = Standar Error

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan df (*degree of freedom*) $n-k$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. (Widarjono, 2016 : 59).

Didalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol r_{xy} atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai $r = 1$, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai $r = 0$, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X, menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negative pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y. (Widarjono, 2013 : 7).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedasitas.

1. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2011: 105-106) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas Uji *Variance Inflation Factors*

Variance Inflation Factors			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
DAK	4.01E-17	6.426425	2.840689
PAD	2.56E-17	13.20949	2.835377
DBH	7.16E-16	19.85232	1.004901
C	2.030191	23.60706	NA

Sumber: Hasil olah Eviews 8

Di atas menunjukkan bahwa nilai Centered VIF baik X1 dan X2 adalah kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model prediksi.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan “pengganggu” pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM).. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Hasil Uji Autokorelasi Uji *Lagrange Multiplier*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	1.815490	Prob. F(3,4)	0.2841	
Obs*R-squared	6.342176	Prob. Chi-Square(3)	0.0961	
Sample: 2007 2017				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAK	-4.73E-09	6.19E-09	-0.764722	0.4871
PAD	4.66E-09	5.20E-09	0.894856	0.4214
DBH	2.45E-08	2.66E-08	0.923794	0.4079
C	-1.581254	1.467430	-1.077567	0.3419
RESID(-1)	-0.899413	0.539636	-1.666702	0.1709
RESID(-2)	-0.872694	0.498893	-1.749262	0.1551
RESID(-3)	-0.173337	0.486363	-0.356395	0.7395
R-squared	0.576561	Mean dependent var	1.15E-15	
Adjusted R-squared	-0.058596	S.D. dependent var	0.813753	
S.E. of regression	0.837256	Akaike info criterion	2.743751	
Sum squared resid	2.803987	Schwarz criterion	2.996958	
Log likelihood	-8.090633	Hannan-Quinn criter.	2.584140	
F-statistic	0.907745	Durbin-Watson stat	1.760109	
Prob(F-statistic)	0.564866			

Sumber: Hasil olah Eviews 8

Perhatikan nilai Prob Chi Square(2) yang merupakan nilai p value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*, yaitu sebesar 0,0961 dimana $> 0,05$ sehingga terima H_0 atau yang berarti tidak ada masalah autokorelasi serial.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang mengalami homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji white. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan program Eviews 8 yang akan

memperoleh nilai probabilitas Obs*R-square yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α). Jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya di bawah 0,05 maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas Uji White Test

Heteroskedasticity Test: White				
F-statistic	2.535039	Prob. F(3,7)	0.1402	
Obs*R-squared	5.727875	Prob. Chi-Square(3)	0.1256	
Scaled explained SS	1.848318	Prob. Chi-Square(3)	0.6045	
Sample: 2007 2017				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.619573	0.584558	2.770595	0.0277
DAK^2	2.25E-17	1.74E-17	1.290838	0.2378
PAD^2	-2.31E-17	9.71E-18	-2.375896	0.0492
DBH^2	-1.27E-16	1.91E-16	-0.664391	0.5277
R-squared	0.520716	Mean dependent var	0.601995	
Adjusted R-squared	0.315308	S.D. dependent var	0.797059	
S.E. of regression	0.659535	Akaike info criterion	2.280725	
Sum squared resid	3.044907	Schwarz criterion	2.425414	
Log likelihood	-8.543986	Hannan-Quinn criter.	2.189518	
F-statistic	2.535039	Durbin-Watson stat	2.893131	
Prob(F-statistic)	0.140236			

Sumber: Hasil olah Eviews 8

Hasil output menunjukkan nilai *Obs*R-squared* adalah sebesar **5,72** sedangkan nilai *probabilitas (chi-square)* adalah **0,125** (lebih besar daripada $\alpha = 0,05$), dengan demikian kita dapat menerima hipotesis nol bahwa data tidak mengandung masalah *heteroskedastisitas*.

Regresi Berganda

Hasil Regresi Berganda

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *eviews* untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kemiskinan (Y1) (variabel dependen) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X2), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X), dan Dana Bagi Hasil (X34) (variabel independen) di Kota Manado: Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Berganda

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Sample: 2007 2017				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-6.97E-09	2.87E-09	-2.429055	0.0512
X2	1.03E-11	3.88E-10	0.026465	0.9797
X3	5.77E-09	3.36E-09	1.716634	0.1369
X4	-7.09E-09	1.42E-08	-0.499886	0.6350
C	6.656721	0.759546	8.764083	0.0001
R-squared	0.554609	Mean dependent var	5.529091	
Adjusted R-squared	0.257682	S.D. dependent var	0.598606	
S.E. of regression	0.515746	Akaike info criterion	1.816551	
Sum squared resid	1.595965	Schwarz criterion	1.997412	
Log likelihood	-4.991030	Hannan-Quinn criter.	1.702543	
F-statistic	1.867829	Durbin-Watson stat	1.823635	
Prob(F-statistic)	0.235358			

Sumber: Hasil olah Eviews 8

Hasil estimasi PAD (X1) pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel PAD (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y). Nilai signifikansi sebesar 0.0512 lebih kecil dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.1649 < 0.10$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Variabel PAD (X1) mempunyai t_{hitung} yakni 2.429055 dengan $t_{tabel} = 1.4149$. jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel PAD (X1) memiliki kontribusi terhadap variabel kemiskinan (Y). Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel PAD (X1) mempunyai hubungan yang tidak searah dengan pertumbuhan ekonomi (Y). Jadi disimpulkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil estimasi DAU (X2) pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel DAU (X1) berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi(Y). Nilai signifikansi sebesar 0.9797 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.9797 > 0.10$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel DAU (X₂) mempunyai t_{hitung} yakni 0.026465 dengan $t_{tabel} = 1.4149$ jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel DAU (X₂) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel kemiskinan (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel DAU (X₂) mempunyai hubungan yang searah dengan kemiskinan (Y). Jadi disimpulkan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil estimasi DAK (X3) pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel DAK (X3) berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y). Nilai signifikansi sebesar 0.1369 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.1369 > 0.10$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel DAK (X₃) mempunyai t_{hitung} yakni 1.716634 dengan $t_{tabel} = 1.4149$ jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel DAK (X₃) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel kemiskinan (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel DAK (X₃) mempunyai hubungan yang searah dengan kemiskinan (Y). Jadi disimpulkan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil estimasi DBH (X_3) pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel DBH (X_1) berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y). Nilai signifikansi sebesar 0.6350 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.6350 > 0.10$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel DBH (X_3) mempunyai t_{hitung} yakni 0.499886 dengan $t_{tabel} = 1.4149$ jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel DBH (X_3) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel kemiskinan (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel DBH (X_3) mempunyai hubungan yang searah dengan kemiskinan (Y). Jadi disimpulkan dana bagi hasil memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Uji Simultan (Uji f)

Nilai F-statistik yang diperoleh 1.867829 sedangkan F-tabel 4.35. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha=5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/4-1)= 3$ dan df untuk denominator $(n-k/11-4)= 7$. Dengan demikian F-statistik lebih kecil dari F-tabel yang artinya bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh positif terhadap kemiskinan

Koefisien Determinan (R^2)

Dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar $0.554609 = 55,46\%$. Artinya, bahwa variable kemiskinan (Y) 55,46% variasinya dijelaskan oleh variasi variable PAD, DAU, DAK dan DBH sisanya 44,54% di jelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Yang artinya, apabila pendapatan asli daerah meningkat kemiskinan akan turun dan sebaliknya *ceteris paribus*. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pendapatan asli daerah dan kemiskinan. Menurut Halim (2011 :101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah indikator dalam mengukur kemiskinan suatu daerah dimana semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang artinya, apabila dana alokasi umum meningkat kemiskinan akan meningkat dan sebaliknya *ceteris paribus*. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara dana alokasi umum dan kemiskinan. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pusat yang diharapkan digunakan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimana jika pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat artinya pendapatan masyarakat juga meningkat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok atau sehari-hari tercukupi dan angka kemiskinan secara agregat menurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang artinya, apabila dana alokasi khusus meningkat akan mendorong kenaikan kemiskinan dan sebaliknya *ceteris paribus*. Menurut Halim (2002:65), Dana Alokasi Khusus(DAK) adalah: "Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan

menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani 2011). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2013) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai signifikan sebesar $0,451 > \alpha = 0,05$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang artinya, apabila dana bagi hasil meningkat kemiskinan akan meningkat dan sebaliknya *ceteris paribus*. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:42), banyak Negara menggunakan system bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan artinya jika pendapatan asli daerah meningkat, tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana lokasi umum meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana lokasi khusus meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana bagi hasil meningkat akan menurun angka kemiskinan.

Saran

Pemerintah Kota Manado lebih mengoptimalkan lagi untuk potensi-potensi yang ada di daerah dalam menunjang pendapatan asli daerah. Program-program dan kebijakan yang dibuat tentunya di laksanakan sebaaik mungkin agar dapat memberikan hasil yang baik. Seperti program untuk pajak daerah, retribusi daerah dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. (2013). Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya, Ekonosia, Jakarta.
Agus Widarjono. (2016). Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya, Ekonosia, Jakarta.
Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Grafindo
Abimanyu. (2005). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. JAAI, Vol. 08, No. 2, pp.416-424

- Adi, P H. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Abdullah Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* vol. 2, No. 2.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar
- Denni Sulistio Mirza, 2012, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009", *Jurnal ekonomi*, Hal. 1-15.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Munir Badrul. 2002. "Perencanaan Pembangunan Daerah". Bappeda Provinsi NTB
- Ndadari, Laras Wulan, Dan Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. Makalah Disampaikan Dalam The 2nd National Conference Ukwms. Surabaya.
- Nugroho, Heru. 1995. Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta : Aditya Media.
- Suryawati. 2004. Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy